

**REKONSEPSI KOMISI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN
DALAM UUD 1945**

TESIS

Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh
MUHAMMAD ABDU MAULANA
NIM. 02040422022

PASCASARJANA HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Abdu Maulana
NIM : 02040422022
Program : Magister Hukum Tata Negara
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Juni 2024

Yang menyatakan



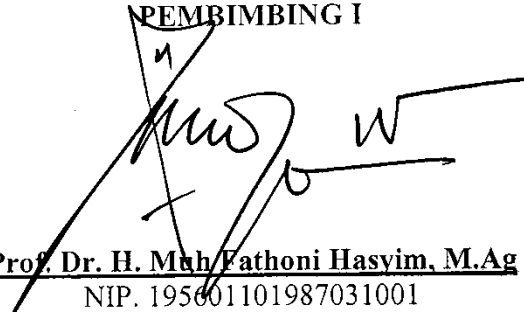
Muhammad Abdu Maulana

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul “Rekonsepsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Independen dalam UUD 1945” yang ditulis oleh Muhammad Abdu Maulana ini telah disetujui pada tanggal 07 Juni 2024

Oleh :

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Muh Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

PEMBIMBING II



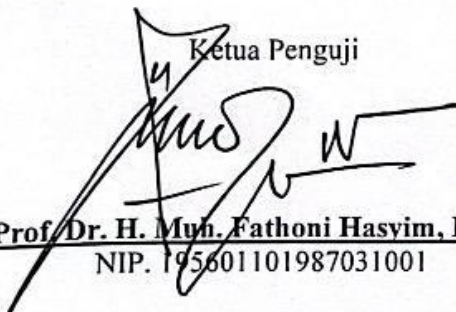
Prof. Dr. Sri Warjiyati, SH, MH
NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

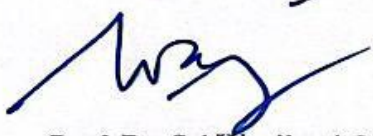
Tesis yang ditulis oleh Muhammad Abdu Maulana, NIM 02040422022 ini telah dipertahankan di depan majelis munaqasah tesis UIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 19 Juni 2024 Dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program pascasarjana strata dua dalam prodi Magister Hukum Tata Negara.

Majelis Sidang Munaqasah :

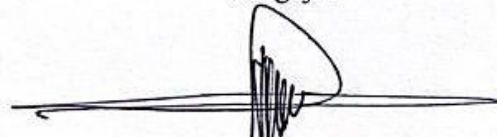
Ketua Penguji


Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasvim, M. Ag
NIP. 195601101987031001

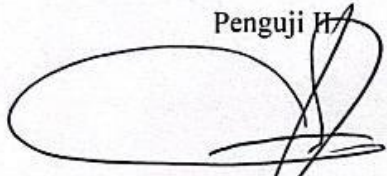
Sekretaris Penguji


Prof. Dr. Sri Warjivati, M.H
NIP. 196808262005012001

Penguji I


Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I.
NIP. 197601212007101001

Penguji II


Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Surabaya, 17 Juli 2025

Mengesahkan,

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Rektor,



Prof. Nuzul Hilmy, S. Ag., MA, Ph.D
NIP. 197103021996031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Abdu Maulana

NIM : 02040422022

Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara

E-mail address : abdumaulana98@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain

yang berjudul: “Rekonsepsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai Lembaga Independen dalam UUD 1945”.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan nya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juni 2024

Muhammad Abdu Maulana

ABSTRAK

Persoalan kedudukan Komnas HAM di Indonesia sampai saat ini masih menimbulkan berbagai masalah, mulai dari posisi kelembagaan Komnas HAM serta regulasi yang mengatur Komnas HAM masih banyak tanda tanya di tengah-tengah masyarakat. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji tentang politik hukum posisi dan regulasi Komnas HAM di Indonesia serta independensi Komnas HAM dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di Indonesia.

Metode penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun dalam sumber bahan hukum yang digunakan ialah sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan hukum tersier, selain itu teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah; 1) Secara historis komnas HAM lahir dari cita-cita negara dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 yang memiliki kemampuan independen dan pengawasan yang mandiri dan 2) untuk memperkuat posisi Komnas HAM harus melakukan kolaborasi supaya memperkuat rekomendasinya dalam mengawal hak asasi manusia di pengadilan.

Kata Kunci: Komnas HAM, Hak Asasi Manusia, Independensi

ABSTRACT

The issue of the position of Komnas HAM in Indonesia until now still raises various problems, starting from the institutional position of Komnas HAM and the regulations governing Komnas HAM, there are still many question marks in the community. The purpose of this study is to examine regarding the legal policy of the position and regulations of the National Human Rights Commission in Indonesia and the independence of the National Human Rights Commission in resolving human rights issues in Indonesia.

This research method is to use a normative legal research method using a conceptual approach and a statute approach. As for the sources of legal materials used are primary legal sources, secondary legal sources and tertiary legal sources, in addition, the analysis technique used by the author is to use a qualitative descriptive technique.

The results of this study are; 1) Historically, Komnas HAM was born from the ideals of the state in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which has independent capabilities and independent supervision and 2) to strengthen the position of Komnas HAM, it must collaborate in order to strengthen its recommendations in guarding human rights in court.

Keywords: National Commission on Human Rights, Human Rights, Independence

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS.....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
MOTTO.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DAN KEPASTIAN HUKUM..	22
A. Teori Lembaga Negara.....	22
B. Teori Lembaga Negara Independen.....	29
C. Teori Politik Hukum.....	33
BAB III POSISI REGULASI KOMNAS HAM DI INDONESIA.....	40
A. Sejarah dan Posisi Komnas HAM di Indonesia.....	40
B. Regulasi Komnas HAM di Indonesia.....	73
BAB IV REKONSEPTUALISASI KOMNAS HAM SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DI INDONESIA.....	81
A. Politik Hukum Komnas HAM di Indonesia.....	81

B. Independensi Komnas HAM di Indonesia dalam mengawal kasus Hak Asasi Manusia.....	87
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syadali, Mudzakir. *Filsafat Umum*. Bandung: Pusaka Setia, 1997.
- Alpases P O Sinaga, Agus Riwanto. "Efektivitas Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Di Indonesia." *Res Publica* 6, no. 3 (2022). <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/63036/0>.
- Amin, Dkk Fakhry. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: PT. Sada Kurnia Perkasa, 2023.
- Amiruddin. "Komnas HAM, Investigating Serious Human Rights Violations: Dynamics and Challenges." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 5, no. 2 (2021).
- Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019).
- Annisa, Sarah Nur. "Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori the New Separation of Power Bruce Ackerman." *JIL : Journal of Indonesian Law* 2, no. 2 (2021).
- Apicha, Lady Mutiara, Rizky Anugrah Iq Berlian, and Monalisa. "Kedudukan Komisi Nasional Ham Dalam Konstitusi Dan Ketatanegaraan." *Siyah Jurnal Hukum Tatanegara* 1, no. 1 (2021).
- Arifin, Ridwan, and Lilis Eka Lestari. "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019).
- Arliman. S, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. 1 (2019).
- Arliman, Laurensius. "Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum." *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang* 8, no. 7 (2020).
- Asmara, Galang. "Eksistensi Komnas Ham Ditinjau Dari Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Perspektif* 7, no. 4 (2002).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah

- Konstitusi RI, 2016.
- Asshidiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2008.
- Aziz, Arasy Pradana A. "Birokratisasi HAM Pasca Reformasi Melalui Pembentukan Kementerian Urusan HAM Dan Penguatan Komnas HAM." *Yurispruden* 2, no. 2 (2019).
- Azkie, Ashfa. "Penerapan Reflexive Law Dalam Upaya Menjamin Keterbukaan Informasi Di Lingkungan Pengadilan." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021).
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT. Bumi Sumekar Aksara, 2016.
- CHRC. "About Candian Human Rights Commision." 2023. <https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/about-us>.
- Dictionary, Webster's Vest Pocket. *Merriam Webster Inc, Publishers Springfield, Massachussets, USA, 1989. Sebagaimana Terkutip Dalam Zulfı Diane Zaini, Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. Bandung: Keni Media, 2012.
- Dimjati, D. "Makna Keadilan Dalam Prespektif Islam." *Realita* 1, no. 1 (2004).
/citations?view_op=view_citation&continue=/scholar%3Fhl%3Den%26as_sdt%3D0,5%26authuser%3D1%26scilib%3D1&citilm=1&citation_for_view=QG_NLYkAAAAJ:M05iB0D1s5AC&hl=en&authuser=1&oi=p.
- Dkk, Nurdiana. *Hukum Tata Negara*. Pamulang: UNPAM Press, 2022.
- Enggarani, Nuria Siswi. "Independensi Peradilan Dan Negara Hukum." *Law and Justice* 3, no. 2 (2019).
- Fajrianto, Fajrianto. "Optimalisasi Peran E-Government Dalam Mendukung Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Atas Informasi Publik." *Res Judicata* 6, no. 2 (2023).
- FRA. "European Union Agency Form Fundamental Rights." <https://fra.europa.eu/en/about-fra>.
- Furqon, Eki. "Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Nurani Hukum* 3, no. 1 (2020).
- Hafiz, Muhammad. *Jaminan Kebebasan Beragama: Norma Ideal, Praktik Dan Lokalitas*. *Jurnal Hak Asasi Manusia*. Vol. 11,

- 2021.
- HAM, Komnas. "Tentang Komnas HAM." *Lembaga Komnas HAM*.
<https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Hutabarat, Dany Tri Utama. "Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Bernegara." *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran* 1, no. 2 (2022).
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- Irma, Mangar, and Ridho Muhammad Rosyid. "Lembaga Independen Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2022).
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/definisi/article/view/18040>.
- Isharyanto. *Hukum Lembaga Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.
- Iswandi, Kelik, and Nanik Prasetyoningsih. "Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020).
- Kusnadi. *Hakikat Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2019.
- Laurensius Arliman S. "Komnas HAM Sebagai State Auxiliary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 40 (2017).
- Made Nurmawati, I Nengah Suantra. *Hukum Kelembagaan Negara*. Denpasar: Fakultas Hukum UNUD, 2020.
- Madon Yanuar. "Lembaga Constitutional Importance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1, no. 1 (2020).
- Maharani, Nirmala Eka. "Isi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dan Sejarahnya." *Tirto.Id*. Last modified 2022.
<https://tirto.id/isi-piagam-perserikatan-bangsa-bangsa-pbb->

- dan-sejarah-nya-gn7f.
- Mahendra, Khumar. "Profil Dan Sejarah Komnas HAM Yang Berdiri Sejak 1993, Berwenang Urusi Pelanggaran HAM Berat?" *Tempo*. Last modified 2013. <https://nasional.tempo.co/read/1808700/profil-dan-sejarah-komnas-ham-yang-berdiri-sejak-1993-berwenang-urusi-pelanggaran-ham-berat>.
- Manan, Bagir. *Politik Undang-Undangan, Penataran Dosen FH/STH PTS Se Indonesia*. Bogor: Cisarua, 1993.
- Matalatta, Andi. "Politik Hukum Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 6, no. Nomor 4 (2009).
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Michael Frans Berry. "Pembentukan Teori Peraturan - Perundang-Undangan." *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (2018).
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- MZ, H. ISMAIL. "Analisis Perubahan Struktur Lembaga Negara Dan Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen." *Ganec Swara* 13, no. 2 (2019).
- Nawawi, Asror. "Komnas Ham: Suatu Upaya Penegakan Ham Di Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2018).
- . "Suatu Upaya Penegakan Ham Di Indonesia." *Hukum Progresif* XI, no. 1 (2017).
- Notario Raja Dolok, Kevin, and Fifiana Wisnaeni Program Studi Magister Kenotariatan. "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pokok Agraria Di Indonesia." *Notarius* 15, no. 02 (2022).
- Ompu Jainah, Zainab. "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *Journal of Rural and Development*, 2012.
- Pasha, Zahlul. "Menilai Kesesuaian Qanun Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2019).
- Patra, Rommy. "Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas

- HAM Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2 (2012).
- Pramesti, Tri Jata Ayu. “Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Hukum Online*. Last modified 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>.
- Prasetyo, Teguh. “Rule of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* 10, no. 1 (2010).
- Puspitasari, Sri Hastuti. “Komnas HAM Indonesia Kedudukan Dan Perannya Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 9, no. 21 (2002): \.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ramadani, Rizki. “Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020).
- Rayhan, Ahmad, and Qotrun Nida. “Hierarkie Lembaga Negara Di Indonesia.” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021).
- Reditya, Tito Hilmawan. “Dampak Perang Dunia II: Dari Ekonomi, Sosial, Politik, Hingga Budaya.” *Kompas*. Last modified 2021. <https://internasional.kompas.com/read/2021/11/17/203000970/dampak-perang-dunia-ii--dari-ekonomi-sosial-politik-hingga-budaya>.
- Rizaldi, Moh. “Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen?” *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 12, no. 1 (2021).
- Santoso, Bambang. *Politik Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2021.
- Santow, Edward. “The Australian Human Rights Commission.” *The Legal Protection of Rights in Australia* (2019).
- Saputra, Agus romdlon. “KONSEP KEADILAN MENURUT AL-QUR’AN DAN PARA FILOSOOF.” *DIALOGIA: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 10, no. 02 (2012). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/310/265>.

- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soedarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Baru, 1983.
- Soeprapto, Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati. *Lmu Perundangundangan*,. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Sriyana. *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007, Materi: Komisi HAM Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.
- Suhardin, Abdul Wahid, and Abid Zamzami. "Eksistensi Komnas HAM Indonesia Dalam Menjalankan Perannya Sebagai Upaya Mencari Keadilan Sehubungan Dengan Pelanggaran HAM." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 2 (2021): 282.
- Sunarto. "Prinsip Chek And Balances." *Jurnal Universitas Diponegoro* 45, no. 2 (2016).
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Kenegaraan Modern)*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Thohari, Imam Syaukani dan A. Ahsin. *Dasar-Dasar Politik Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Triningsih, Anna, and Nuzul Qur'aini Mardiya. "Interpretasi Lembaga Negara Dan Sengketa Lembaga Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2018).
- Ulum, Ahmad Manbaul. "Negara Adil Dan Makmur (Refleksi Filsafat Politik Al-Ghazali)." *Jurnal Politea* 5, no. 1 (2022).
- Ulya, Zaki. *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Keduduk Lembaga Negara Pasca Reformasi)*. Jakarta: Universitas Samudera, 2019.
- Urtjahjo, Hendra N. "Lembaga, Badan Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Body) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-35* 11, no. 1 (2005).
- USCCR. "United States Commision on Civil Rights." <https://www.usccr.gov/about/mission>.
- Winardi, Sirajuddin dan. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Yogia, Moris Adidi, Raden Imam, Al Hafis, Dan Moris, and Adidi

- Yogia. "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia." *Raden Imam Al Hafis PUBLIKA* 3, no. 1 (2017).
- Zainuri, Ahmad. "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 Tentang Penghapusan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Di Indonesia Terhadap Korban HAM Berat Di Indonesia." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Negara Hukum* 9, no. 1 (2018).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A